

## STAKEHOLDERS ANALYSIS: REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI YOGYAKARTA

### STAKEHOLDERS ANALYSIS: UNINHABITABLE HOUSE REHABILITATION IN YOGYAKARTA

Novarenda Pawestri<sup>1</sup>, Francisca Winarni<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

<sup>2</sup>Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

#### INFORMASI ARTIKEL

##### Article history:

Diterima 25-01-23

Diperbaiki 13-02-23

Disetujui 24-02-23

##### Kata Kunci:

*stakeholders analysis*,  
Program KOTAKU,  
rehabilitasi RTLH

##### Keywords:

*stakeholder analysis*,  
KOTAKU Program,  
uninhabitable houses  
rehabilitation

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *stakeholders analysis* dalam rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Yogyakarta. Jenis penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap identifikasi, *stakeholders* yang terlibat ialah pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat; kemudian pada klasifikasi dan kategorisasi, *stakeholders* yang terlibat masuk ke dalam kelompok *key players*, *subjects*, dan *crowds*. Sedangkan pada tahap investigasi hubungan antar *stakeholders*, jalinan hubungan yang terjadi ialah hubungan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama. Berdasarkan hasil temuan *stakeholders analysis* diketahui bahwa keterlibatan dari masing-masing *stakeholders* dalam menerapkan prinsip pelaksanaan Program KOTAKU belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Ketidakoptimalan tersebut disebabkan oleh peran serta atau kontribusi dari *stakeholders* yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan pada penerapan prinsip Program KOTAKU.

#### ABSTRACT

*This study aims to determine the stakeholder analysis in the rehabilitation of uninhabitable houses in Yogyakarta City. This type of research is descriptive qualitative. The results showed that at the identification stage, the stakeholders involved were the government, the private sector, academics, and the community; then in the classification and categorization, the stakeholders involved fell into the key players, subjects, and crowds groups. While at the stage of investigating relationships between stakeholders, the relationships that occur are communication, coordination, and cooperation. Based on the findings of the stakeholder analysis, it is known that the involvement of each stakeholder in applying the principles of implementing the KOTAKU Program has not been fully optimal. The non-optimality is caused by the participation or contribution of stakeholders which results in an imbalance in the application of the KOTAKU Program principles.*

## 1. Pendahuluan

Badan Pusat Statistik (2022) menyebutkan bahwa kepadatan penduduk Indonesia mencapai 141 jiwa per km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di berbagai wilayah di Indonesia tersebut akhirnya berimplikasi pada pemenuhan kebutuhan lahan permukiman layak huni termasuk didalamnya pemenuhan kebutuhan akan rumah layak huni. Data Kementerian PUPR tahun 2020 menyebutkan ada setidaknya 1.043 kota di Indonesia yang masuk dalam kategori kawasan permukiman “*kumuh berat*” (Pusdatin Kementerian PUPR, 2021). Dari data tersebut ada setidaknya 7.055 kota di Indonesia yang menjadi prioritas dalam kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh di Indonesia (Pusdatin Kementerian PUPR, 2021).

Pemen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 akhirnya muncul sebagai respon pemerintah terkait permasalahan mengenai pencegahan dan peningkatan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Indonesia. Berkenaan dengan kebijakan tersebut Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya mengesahkan *collaborative platform* yang bernama Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang merupakan suatu program kolaboratif dalam penanganan kawasan permukiman kumuh yang didalamnya mengintegrasikan berbagai sumber daya serta sumber pendanaan dari berbagai sektor maupun aktor.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu wilayah atau kota yang menjadi prioritas dalam agenda penanganan kawasan permukiman kumuh di Indonesia. Dimana Kota Yogyakarta menjadi wilayah perkotaan dengan jumlah Kelurahan yang memiliki kawasan kumuh terbanyak di DIY yakni sebanyak tujuh Kelurahan dengan luas 36,59 Ha. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas PUP-ESDM DIY Tahun 2021, Kota Yogyakarta masuk ke dalam agenda implementasi rehabilitasi RTLH yang berkolaborasi dengan Program KOTAKU pada tahun 2019. Hal tersebut sesuai dengan SK Walikota No. 216 Tahun 2016, yang mana Kelurahan Purwokinanti RW 01 terpilih sebagai *baseline* permukiman kumuh yang nantinya akan ditangani.

Sesuai dengan konsep *collaborative platform*-nya, Program KOTAKU yang berkolaborasi untuk menanganani rehabilitasi RTLH di Kota Yogyakarta melibatkan kolaborasi aktif dan partisipatif dari sejumlah *stakeholders*. Jalinan kolaborasi ini bermula karena keterbatasan dari pengelola Program KOTAKU untuk melakukan rehabilitasi RTLH, sehingga Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR menjalin kolaborasi aktif dengan PT. SMF (Persero) kaitannya dengan penganggaran.

Kompleksitas *stakeholders* yang terlibat dalam implementasi rehabilitasi RTLH di Kota Yogyakarta menjadikan partisipasi dari seluruh *stakeholders* harus terjalin dengan baik dan kondusif. Hal tersebut dikarenakan masing-masing *stakeholders* memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang berbeda-beda, yang apabila tidak dikelola dengan baik akan memberikan implikasi yang buruk bagi pencapaian tujuan program.

Berdasarkan permasalahan mengenai orientasi kepentingan dan pengaruh yang dimiliki oleh masing-masing *stakeholders* maka diperlukan kajian *stakeholders analysis* untuk memahami dan mengidentifikasi *stakeholders* yang dipengaruhi maupun memberikan pengaruh sehingga nantinya bisa menunjukkan kepentingan mana yang kemudian perlu untuk diperhitungkan dalam proses

pembuatan atau pengambilan keputusan (Crosby, 1991). Harapannya pelaksanaan rehabilitasi RTLH di Kota Yogyakarta yang dapat berjalan dengan optimal. Hal tersebut erat kaitannya dengan kerancuan terkait siapa yang perlu untuk dilibatkan secara langsung serta mengapa perlu untuk dilibatkan. Pengetahuan terkait posisi pelibatan *stakeholders* tersebut penting untuk dikaji guna mendukung pencapaian tujuan pelaksanaan rehabilitasi RTLH yang optimal. Sehingga nantinya tidak ada *stakeholders* yang akan merasa dirugikan dan arah strategi kebijakan ataupun perbaikan strategi kebijakan di waktu yang akan datang dapat lebih terakomodir dengan baik.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui *stakeholders analysis* dalam rehabilitasi RTLH di Kota Yogyakarta. Penelitian ini berpedoman pada teori *stakeholders analysis* yang meliputi tiga indikator tahapan yakni identifikasi, klasifikasi dan kategorisasi, serta investigasi hubungan antar *stakeholders* menurut Ackermann dan Eden; De Lopez (Reed et al, 2009).

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan memakai pendekatan deskriptif kualitatif. Pemilihan metode penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian sehingga nantinya peneliti mampu menjelaskan data empiris di lapangan secara spesifik yang disajikan dalam bentuk naratif berdasarkan realitas yang terjadi. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Agustus 2022 hingga Januari 2023 dengan berlokasi di Jagalan Ledoksari, RW 01, Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta, Provinsi DIY. Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara *face-to-face* maupun *zoom meeting* dengan subjek penelitian yang berasal dari unsur pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur, laporan, regulasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data dilakukan melalui *membercheck* dan triangulasi sumber. Teknik analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman dalam Moleong, 2012).

## 3. Hasil dan Pembahasan

Tingginya tingkat kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta yang didukung oleh tingginya ketimpangan sosial-ekonomi menjadikan Kota Yogyakarta sebagai salah satu wilayah perkotaan di DIY yang menjadi prioritas dalam penanganan kawasan permukiman kumuh.

Berdasarkan SK Walikota Yogyakarta Nomor 216 Tahun 2016, Kelurahan Purwokinanti menjadi salah satu lokasi permukiman kumuh yang memperoleh manfaat dari implementasi kebijakan tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang telah diatur melalui Perda Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018.

Implementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh berupa rehabilitasi RTLH di Kelurahan Purwokinanti tersebut dilakukan oleh PT. SMF (Persero) dengan menjalin kolaborasi aktif bersama Ditjen Cipta Karya

Kementerian PUPR melalui Program KOTAKU dengan memperhatikan penerapan prinsip Pemerintah Daerah sebagai nahkoda, *good governance*, dan partisipatif.

Penyelenggaraan rehabilitasi RTLH di Kota Yogyakarta memiliki jalinan kolaborasi antar *stakeholders* yang cukup kompleks. Hal tersebut berkenaan dengan pembiayaan rehabilitasi RTLH yang mendapatkan *support* penuh oleh PT. SMF (Persero). Namun fasilitator program dan pengelola fisiknya diperoleh dari pengelola Program KOTAKU.

Menurut Benjamin Crosby (1991), kajian *stakeholders analysis* memiliki tujuan untuk menunjukkan kepentingan mana yang kemudian perlu untuk dipertimbangkan. Tahapan *Stakeholders Analysis* ini diantaranya adalah sebagai berikut:

### 3.1. Identifikasi Stakeholders

Reed et al (2009) dalam tahapan identifikasi *stakeholders* ini memberikan tiga metode untuk mengidentifikasi *stakeholders* yang diantaranya adalah *focus groups*, *semi-structured interviews*, dan *snow-ball sampling*.

Penelitian ini menggunakan *semi-structured interviews* dengan didukung oleh *snow-ball sampling*, yang nantinya dapat teridentifikasi *stakeholders* mana saja yang terlibat dalam rehabilitasi RTLH di Kota Yogyakarta. *Stakeholders* tersebut meliputi unsur pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat.

Tabel 1. *Stakeholders* dalam Rehabilitasi RTLH di Kota Yogyakarta

No	<i>Stakeholders</i>	Keterangan
1	Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR	Pemerintah Pusat
2	Tim KOTAKU Balai Prasarana Permukiman Wilayah DIY	Pemerintah Kota
3	DPUPKP Kota Yogyakarta	Pemerintah Kota
4	BAPPEDA Kota Yogyakarta	Pemerintah Kota
5	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	Pemerintah Kota
6	Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta	Pemerintah Kota
7	DAMKARMAT Kota Yogyakarta	Pemerintah Kota
8	PT. SMF (Persero)	Swasta
9	<i>Low Carbon Development Indonesia</i> (LCDI)	Swasta
10	SPEAK Indonesia	Swasta
11	Perguruan Tinggi UKDW	Akademisi
12	Badan Keswadayaan Masyarakat	Masyarakat
13	Kelompok Swadaya Masyarakat	Masyarakat
14	Kelompok Pemanfaat & Pemelihara	Masyarakat
15	Masyarakat Penerima Manfaat	Masyarakat

### 3.2. Klasifikasi dan Kategorisasi Stakeholders

Menurut Ackermann dan Eden; De Lopez (Reed et al, 2009) metode untuk mengklasifikasikan *stakeholders* meliputi *interest-influence matrices*, *radical transactiveness*, *stakeholders-led stakehodler categorisation*, dan *Q-methodology*.

Penelitian ini menggunakan metode *interest-influence matrices* yang menganalisis kategori *stakeholder* dari unsur kepentingan dan unsur pengaruh masing-masing *stakeholder*. Kelompok *stakeholders* yang digunakan ialah

kelompok *stakeholders* menurut Ackermann dan Eden; De Lopez dalam Reed et al (2009) yang terdiri atas *key players*, *context setters*, *subjects*, dan *crowds*.

Masing-masing kelompok *stakeholders* kemudian dianalisis menuruttingkat kepentingan dan pengaruh yang diberikan. Selanjutnya tingkatan kepentingan dan pengaruh yang dimiliki tersebut mencakup empat tingkatan yang dinilai ke dalam tingkatan tinggi, sedang, rendah, dan nihil. Keempat tingkatan tersebut digunakan peneliti untuk mengukur keterlibatan *stakeholders* sesuai dengan kriteria unsur dalam pelaksanaan program KOTAKU pada rehabilitasi RTLH di Kota Yogyakarta yang meliputi prinsip Pemerintah Daerah sebagainahkoda, kemudian prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*GoodGovernance*), dan prinsip partisipatif.

Tingkatan “*tinggi*” jika *stakeholders* memiliki keterlibatan dalam tiga prinsip, tingkatan “*sedang*” jika *stakeholders* memiliki keterlibatan dalam dua prinsip, tingkatan “*rendah*” jika *stakeholders* memiliki keterlibatan dalam satu prinsip, dan tingkatan “*nihil*” jika *stakeholders* tidak memiliki keterlibatan apapun.

Kriteria unsur kepentingan meliputi harapan *stakeholders*, kontribusi *stakeholders*, serta manfaat yang dirasakan bagi *stakeholders*. Sementara itu unsur pengaruh meliputi kewenangan, keterlibatan *stakeholders*, dan pengaruh terhadap *stakeholders*.

Tabel 2. Klasifikasi Stakeholders

No	Stakeholders	Kelompok	Kuadran
1	Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR	<i>Key Players</i>	I
2	Tim KOTAKU Balai PPW DIY (Koordinator Kota)	<i>Key Players</i>	I
3	DPUPKP Kota Yogyakarta	<i>Key Players</i>	I
4	BAPPEDA Kota Yogyakarta	<i>Subjects</i>	III
5	Dinkes Kota Yogyakarta	<i>Crowds</i>	IV
6	DLH Kota Yogyakarta	<i>Crowds</i>	IV
7	Damkarnat Kota Yogyakarta	<i>Crowds</i>	IV
8	PT. SMF (Persero)	<i>Key Players</i>	I
9	LCDI	<i>Crowds</i>	IV
10	SPEAK Indonesia	<i>Crowds</i>	IV
11	Perguruan Tinggi UKDW	<i>Crowds</i>	IV
12	BKM	<i>Subjects</i>	III
13	KSM	<i>Subjects</i>	III
14	KPP	<i>Crowds</i>	IV
15	Masyarakat Penerima Manfaat	<i>Subjects</i>	III

Sumber: Data Diolah Peneliti (2022)

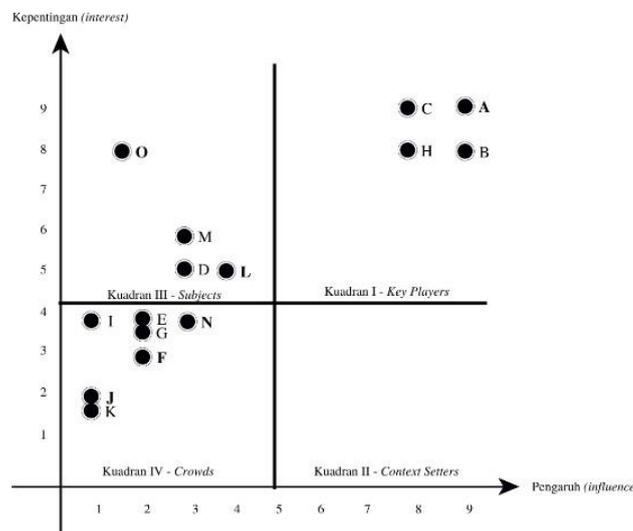
Dari hasil pengelompokkan *stakeholders*, dapat disimpulkan bahwa pembagian tugas antara unsur pemerintah yang meliputi pemerintah pusat dengan Pemkot Yogyakarta dan PT. SMF di implementasi rehabilitasi RTLH di Kota Yogyakarta memiliki pengaruh yang tinggi untuk dapat mempengaruhi *stakeholders* yang lain, khususnya *stakeholders* dari unsur pemerintah dan dari unsur swasta berupa PT. SMF (Persero).

Hal tersebut berdampak pada keburaman dalam pelaksanaan kebijakan khususnya dalam hal penentuan jumlah RTLH yang nantinya direhabilitasi berdasarkan lokasi kumuh yang telah masuk ke SK Walikota Yogyakarta. Hal lain yang dijadikan perhatian ialah posisi masyarakat penerima manfaat dan KSM yang

masuk ke dalam kelompok *subjects* yang memiliki kemungkinan untuk terjadi marginalisasi sosial sebagai akibat dari ketidakberdayaan masyarakat di suatu kebijakan.

Tidak adanya *stakeholder* kelompok *context setters* disebabkan prinsip pemerintah daerah sebagai nahkoda. Sehingga pengaruh tinggi dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah daerah khususnya pemerintah kota Yogyakarta bersama dengan Koordinator Kota Program KOTAKU Kota Yogyakarta dibawah Balai PPW DI Yogyakarta yang dinaungi oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR.

Berdasarkan hasil klasifikasi dan kategorisasi *stakeholders*, maka hasil kajian terkait unsur kepentingan dan unsur pengaruh dari masing-masing *stakeholders* dapat disajikan dalam *interest-influence matrices*. Penyajian *interest-influence matrices* didasarkan dari hasil penentuan titik koordinat dari *stakeholders* yang didalamnya terdapat skor derajat unsur kepentingan dan unsur pengaruh. Berikut ini ialah gambaran dari *interest-influence matrices* dalam pelaksanaan rehabilitasi RTLH di Kota Yogyakarta:



Gambar 1. Interest-Influence Matrices  
Sumber: Data Diolah Peneliti (2022)

Berdasarkan *interest-influence matrices* diatas maka dapat diketahui bahwa Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR menjadi *stakeholder* dengan kepentingan dan pengaruh paling tinggi sehingga masuk dalam kelompok *key players* bersama dengan Tim KOTAKU dan PT. SMF (Persero). Pada kelompok *subjects* meliputi BAPPEDA Kota Yogyakarta, BKM, KSM, dan masyarakat. Sementara itu kelompok *crowds* meliputi Dinas Kesehatan, DLH, Damkarnat Kota Yogyakarta, LCDI, SPEAK Indonesia, UKDW, dan KPP. *Stakeholders* yang terlibat dalam rehabilitasi RTLH di Kota Yogyakarta saling berinteraksi sehingga menciptakan hubungan antar *stakeholders*.

Aspek kepentingan dan pengaruh dari masing-masing *stakeholders* adalah elemen penting terhadap ketercapaian tujuan program maupun keberhasilan kebijakan. Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh De Lopez (2001) yang menunjukkan bahwa kajian *stakeholders analysis* khususnya pada klasifikasi *stakeholders* merupakan elemen penting yang berguna sebagai alat untuk mempengaruhi *stakeholders* yang terlibat untuk dapat berpikir secara sistematis sekaligus mempertimbangkan seluruh alternatif manajemen yang dapat digunakan dalam pencapaian tujuan kebijakan.

### 3.3. Investigasi Hubungan antar Stakeholders

Melalui metode *actor-linkage matrices*, hasil analisis hubungan antar *stakeholders* disajikan dalam bentuk deskripsi alur hubungan yang dilengkapi dengan unsur yang ada dalam jalinan hubungan *stakeholders* tersebut. Berkaitan dengan jenis jalinan hubungan yang dimiliki antar *stakeholders*, maka bentuk jalinan hubungan dibagi tiga yang didasarkan pada bentuk komunikasi, koordinasi, dan kerjasama yang dilakukan oleh antar *stakeholders* (Reed et al., 2009).

Tabel 3. Jalinan Hubungan Komunikasi antar *Stakeholders*

No	Komunikator	Isi Informasi	Komunikan
1	Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR	1) Penetapan lokasi penanganan kumuh 2) Penetapan BKM	1) PT. SMF (Persero) 2) Tim KOTAKU 3) DPUPKP
2	Tim KOTAKU	1) Usulan <i>baseline</i> lokasi penanganan kumuh 2) Penguatan kapasitas masyarakat	1) DJCK Kementerian PUPR 2) Masyarakat
3	DPUPKP	1) Pendampingan & pengawasan implementasi kebijakan 2) Pengelolaan Dana Bina Lingkungan	1) BKM 2) KSM
4	Dinas Kesehatan	Pengecekan kualitas air minum dan sanitasi	Masyarakat penerima manfaat
5	Damkarnat & DLH	Pemeliharaan prasarana & penggunaan instalasi pemadam kebakaran	Masyarakat penerima manfaat & KPP
6	BKM	Sosialisasi untuk anggsuran dana perguliran	Masyarakat penerima manfaat
7	LCDI	Pembentukan dokumen perencanaan	Tim KOTAKU & BKM
8	SPEAK Indonesia	Penyuluhan & penguatan swakelola masyarakat	Masyarakat penerima manfaat
9	Perguruan Tinggi UKDW	<i>Brand</i> kampung	Tim KOTAKU

Sumber: Data Diolah Peneliti (2022)

Berkaitan dengan jalinan hubungan komunikasi ternyata melibatkan seluruh *stakeholders* yang terlibat dalam rehabilitasi RTLH di Kota Yogyakarta. Jalinan komunikasi yang tercipta berkenaan dengan penerapan ketiga prinsip program KOTAKU. Dimana penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah yang paling sedikit. Sehingga kesadaran dari masing-masing *stakeholders* untuk memacu pembangunan kapasitas pemerintah daerah dan

masyarakat agar nantinya mampu melaksanakan dan mengelola pembangunan di wilayahnya secara mandiri (swakelola) masih rendah.

Tabel 4. Jalinan Hubungan Koordinasi antar Stakeholders

No	Stakeholder I	Inti Koordinasi	Stakeholder II
1	Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR	Penugasan Pokja PKP & Satker atau Tim KOTAKU	Pemerintah Kota Yogyakarta & Tim KOTAKU
2	Tim KOTAKU	Penugasan KSM & KPP	KSM & KPP
3	DPUPKP Kota Yogyakarta	Pelibatan OPD dalam mendukung implementasi kebijakan (pelatihan-pelatihan)	BAPPEDA, Dinas Kesehatan, DLH, Damkarnat Kota Yogyakarta
4	Tim KOTAKU	Penugasan Konsultan Perencana & Konsultan Pengawas	PT. SMF (Persero)
5	PT. SMF (Persero)	Penyaluran Dana Bina Lingkungan (DBL)	DJCK Kementerian PUPR, Tim KOTAKU, Pemerintah Kota, BKM

Sumber: Data Diolah Peneliti (2022)

Jalinan hubungan koordinasi dalam rehabilitasi RTLH di Kota Yogyakarta hanya terdapat lima hubungan yang berkaitan dengan penerapan ketiga prinsip Program KOTAKU.

Tabel 5. Jalinan Hubungan Kerjasama antar Stakeholders

No	Stakeholder I	Bentuk Kerjasama	Stakeholder II
1	Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR	Pendanaan kebijakan melalui Dana Bina Lingkungan	PT. SMF (Persero)
2	Tim KOTAKU	Pelatihan penggunaan instalasi pemadam kebakaran	Damkarnat Kota Yogyakarta
3	PT. SMF (Persero)	Pengelolaan Dana Bina Lingkungan (DBL) dan dana perguliran	BKM
4	Tim KOTAKU	Penyediaan data lokasi RTLH & lokasi kumuh	DPUPKP Kota Yogyakarta
5	DPUPKP Kota Yogyakarta	Penyediaan data RTLH	BAPPEDA Kota Yogyakarta
6	Tim KOTAKU	Pengecekan kualitas air	Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Sumber: Data Diolah Peneliti (2022)

Jalinan hubungan kerjasama antar *stakeholders* dalam rehabilitasi RTLH di Kota Yogyakarta tidak melibatkan seluruh *stakeholders*. Dimana masyarakat penerima manfaat, KSM, KPP, DLH Kota Yogyakarta, LCDI, SPEAK Indonesia dan UKDW tidak terlibat dalam hubungan kerjasama secara langsung. Sehingga hanya ada satu hubungan kerjasama yang berkenaan dengan prinsip pemerintah daerah sebagai nahkoda dan prinsip partisipatif. Sementara prinsip *Good Governance* merupakan penerapan prinsip dengan jalinan kerjasama yang paling baik.

Investigasi hubungan antar *stakeholders* menjadi aspek penting dalam kajian *stakeholders analysis*, hal tersebut disebabkan oleh eksistensi dari keterlibatan pada masing-masing *stakeholders* yang tidak mampu memberikan

pengaruh terhadap keberhasilan kebijakan dan pencapaian tujuan kebijakan tanpa adanya penciptaan nilai-nilai mengenai kontribusi yang terjalin dalam suatu hubungan komunikasi, koordinasi, maupun kerjasama antar *stakeholders*. Urgensi mengenai penciptaan nilai-nilai yang dapat diwujudkan melalui jalinan hubungan antar *stakeholders* tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Myllykangas et al (2010) yang menyebutkan bahwa jalinan hubungan antar *stakeholders* yang telah diidentifikasi tidak hanya mampu menunjukkan jawaban mengenai siapa dan apa yang perlu dilibatkan, melainkan mampu menunjukkan jawaban mengenai bagaimana nilai kontribusi *stakeholders* dapat diciptakan dari jalinan hubungan antar *stakeholders*.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis mengenai keterlibatan *stakeholders* dalam rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kota Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa tahap identifikasi, *stakeholders* yang terlibat adalah pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat; pada klasifikasi dan kategorisasi, *stakeholders* yang terlibat masuk ke kelompok *key players*, *subjects*, dan *crowds*. Sementara pada investigasi hubungan antar *stakeholders*, jalinan hubungan yang terjadi adalah komunikasi, koordinasi, dan kerjasama. Dengan demikian dapat diketahui bahwa keterlibatan dari masing-masing *stakeholders* dalam menerapkan prinsip Program KOTAKU belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal tersebut disebabkan peran serta atau kontribusi dari *stakeholders* yang berakibat pada ketidakseimbangan dalam penerapan prinsip Program KOTAKU.

Berdasarkan simpulan hasil penelitian diatas maka saran yang kemudian ditawarkan oleh peneliti diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Diperlukannya Konsultan Pengawas
2. Diperlukannya persiapan lebih dalam hal penguatan kapasitas masyarakat
3. Diperlukannya revitalisasi BKM
4. Diperlukan suatu perbaikan substansi kebijakan yang lebih fleksibel untuk dilaksanakan di daerah
5. Diperlukannya pendampingan kepada KSM dan KPP

## Referensi

- [1] Anggraini, B. L., & Kurniawan, B. (2021). Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Di Kabupaten Tuban. *Publika*, 309–322.
- [2] Crosby, B. (1991). Stakeholder Analysis : A Vital Tool for Strategic Managers. *U.S Agency for International Development*, 2, 1–6
- [3] Davis, M. (2004). Planet of slums. In *New Left Review* (Issue 26). <https://doi.org/10.22296/2317-1529.2006v8n1p101>.
- [4] de Haan, A. R. C. (2007). Aircraft Technology ' s Contribution to Sustainable Development. In *Delft University of Technology*.
- [5] Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. (2018). *Strategi CB untuk KOTAKU*.
- [6] Kivits, R. A. (2011). Three component stakeholder analysis. *International Journal of Multiple Research Approaches*, 5(3), 318–333.
- [7] Myllykangas, P., Kujala, J., & Lehtimäki, H. (2010). Analyzing the essence of stakeholder relationships: What do we need in addition to power, legitimacy, and urgency? *Journal of Business Ethics*, 96(2010), 65–72.
- [8] Noland, J., & Phillips, R. (2010). Stakeholder engagement, discourse ethics and strategic management. *International Journal of Management Reviews*, 12(1), 39–49.
- [9] Nugraha, A. F., Amirudin, S., & Haris, D. M. (2014). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rs-Rtlh) Di Kota Serang. *Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*.
- [10] Olsson, J. (2008). dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. *信阳师范学院*, 1(1), 305.
- [11] Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C. H., & Stringer, L. C. (2009). Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Management*, 90(5), 1933–1949.
- [12] Van Huijstee, M., & Glasbergen, P. (2008). The practice of stakeholder dialogue between multinationals and NGOs. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 15(5), 298–310.
- [13] Dokumen Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024
- [14] Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- [15] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- [16] Surat Edaran Nomor 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh Daellenbach, Hans G., McNickle, Donald C., *Management science, Decision making through systems thinking*, Palgrave Macmilan, 2005.